

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Kondisi Nasional Periode 2009-2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Salah satu perwujudan dari visi tersebut adalah ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan capaian pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan inflasi yang terkendali, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat.

Capaian indikator kesejahteraan rakyat ditandai dengan pendapatan per kapita US\$ 4.000 pada tahun 2014. *Human Development Index* (HDI) Indonesia 0,732 pada tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia membaik. Jika pada tahun 2009 tingkat kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 menjadi 11,96 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 persen, maka pada tahun 2014 menjadi 5,62 persen.

Di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah 32 (2012), dan hal ini tidak diimbangi dengan angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, di mana angka kematian ibu melahirkan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012). Berdasarkan data dimaksud, maka hasil tersebut masih jauh dari target MDG's, yaitu 100 per 100.000 kelahiran di tahun 2015.

2. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh mandat membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu: a) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, b) pengembangan investasi sumber daya manusia (SDM) dan kemasyarakatan, serta c) penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan seperti beras miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM dengan berbagai sasaran dan klasifikasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat langsung menyentuh permasalahan di bidang kemiskinan. Angka kemiskinan nasional secara absolut pada tahun 2009 sebesar 14,1 persen dan menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.

Secara umum, hasil analisis data dari BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2009 hingga Maret 2014 mengalami

penurunan, kecuali pada September 2013 mengalami kenaikan dari jumlah maupun prosentasenya dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

b. Pengembangan Investasi SDM dan Kemasyarakatan

Pengembangan dan investasi SDM dan Kemasyarakatan adalah pilar kedua yang sangat penting bagi keseluruhan pembangunan Indonesia. Realisasi investasi SDM berdasarkan sasaran strategis pilar II ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pilar II Investasi SDM Tahun 2010-2014

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	TARGET	REALISASI
Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat	2009-2010	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,27	72,27
	2010-2011	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,77	72,77
	2011-2012	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,10	73,29
	2012-2013	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,60	73,79

Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diupayakan dengan program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan penekanan program pada sasaran penurunan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), koordinasi penanggulangan penyakit degeneratif, dan kardiovaskular melalui kampanye hidup sehat-seimbang.

Selama periode 2010-2014, peningkatan angka IPM secara nasional meningkat sebesar 0,5 persen. Menurut UNDP, IPM di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik pada periode RPJMN 2010-2014. Berdasarkan lokasi daerah perkotaan atau perdesaan, IPM masih rendah di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, Sumatera, dan Bali.

Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti NTT, NTB, dan Papua juga mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

c. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan Kemenko Kesra, beberapa hal telah dicapai selama periode 2010-2014 dalam penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2010, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 120 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat Provinsi menjadi 341 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat provinsi; Telah dipasang *buoy* sebanyak 12 buah yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi masyarakat terhadap ancaman tsunami; Penyusunan draf Program Nasional Penanggulangan Kerawanan Sosial (PNPKS) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), LSM, dan perguruan tinggi; serta Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) (jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/Kep/Menko/Kesra tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta pekerja migran Indonesia bermasalah sosial dan keluarganya dari Malaysia dan negara lainnya

Pada tahun 2011, Indonesia mendapat kepercayaan di tingkat ASEAN untuk membentuk *ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA CENTER)* dan Indonesia disepakati menjadi ketua di tingkat ASEAN.

Pada tahun 2013 koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan telah menurunkan jumlah titik *hot spot* di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan, seperti di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebesar 19.353 titik. Selain itu dalam penanganan WNIO, telah dipulangkan dari Jeddah pada masa amnesti menggunakan *empty flight*

haji Garuda Indonesia berjumlah 714 orang, diantaranya 458 perempuan dan 100 anak.

Pencapaian ketiga pilar program tersebut telah dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dari berbagai sektor. Koordinasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial, perlindungan sosial dan perumahan rakyat, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan dan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial telah tersusun beberapa kebijakan. Kemenko Kesra telah menyelesaikan Dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Posnas Karhutla) sebagai upaya konkrit pencegahan terjadinya kabut asap yang sering mengganggu hubungan antar negara.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, meliputi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), program jaminan sosial, program penyandang cacat dan disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,5 persen dari kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2014, melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kesehatan telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Penanggulangan Nasional HIV/AIDS, Komisi Nasional Zoonosis, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1.000 hari pertama kehidupan, percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, *grand design* kependudukan dan ketenagaan kesehatan. Kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra tentang jejaring pangan terpadu, *center communication forum* (CCF), tim rencana aksi kesehatan dan lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.